Anti-Copyright

Noam Chomsky
Timor Timur, Kengerian dan Amnesia
Kemunafikan Barat
1999

https://theanarchistlibrary.org/library/noam-chomsky-east-timor-horror-and-amnesia
Diterjemahkan oleh Aan Zaputra

sea.theanarchistlibrary.org

Timor Timur, Kengerian dan Amnesia

Kemunafikan Barat

Noam Chomsky

1999

Seperempat abad telah berlalu antara 7 Desember 1975, hari ketika Indonesia menginvasi dan mencaplok Timor Timur, dan referendum 30 Agustus 1999 di mana 78,5% penduduk menyerukan kemerdekaan. Dua ratus ribu orang Timor tewas selama "integrasi" yang dipaksakan ini sementara masyarakat dunia tidak peduli. Jatuhnya Suharto membuka jalan bagi perubahan, dengan Jakarta akhirnya menyetujui referendum — tetapi bersiap untuk menghadapi pemungutan suara untuk kemerdekaan dengan penindasan. Pada 20 September, Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengirim pasukan multinasional (Interfet) di bawah komando Australia. Ini tidak dapat mengatasi masalah 300.000 orang Timor yang dideportasi ke Timor Barat atau membawa para penyiksa ke pengadilan internasional. Ini juga tidak boleh membuat kita melupakan keterlibatan Barat selama 25 tahun dengan kediktatoran Jakarta.

Tidak mudah untuk menulis dengan pura-pura tenang dan tanpa emosi tentang peristiwa yang sedang berlangsung di Timor Timur. Kengerian dan rasa malu diperparah oleh fakta bahwa kejahatan tersebut begitu lazim dan dapat dengan mudah dihentikan oleh masyarakat internasional sejak lama. Indonesia menginvasi wilayah tersebut pada bulan Desember 1975, mengandalkan dukungan diplomatik dan persenjataan AS, yang digunakan secara ilegal, tetapi dengan otorisasi rahasia dari Washington; bahkan ada pengiriman senjata baru yang dikirim dengan kedok "embargo" resmi. Tidak perlu mengancam dengan pemboman atau bahkan sanksi. Sudah cukup bagi AS dan sekutunya untuk menarik partisipasi aktif mereka, dan memberi tahu rekan dekat mereka di komando militer Indonesia bahwa kekejaman harus dihentikan dan wilayah tersebut diberikan hak penentuan nasib sendiri yang telah ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. Kita tidak dapat membatalkan masa lalu, tetapi setidaknya kita harus bersedia mengakui apa yang telah kita lakukan, dan menghadapi tanggung jawab moral untuk menyelamatkan sisa-sisa dan memberikan ganti rugi yang cukup – sebuah tindakan kecil sebagai kompensasi atas kejahatan yang mengerikan.

Bab terakhir dalam kisah menyakitkan tentang pengkhianatan dan keterlibatan ini dibuka tepat setelah referendum 30 Agustus 1999 ketika penduduk memilih kemerdekaan dengan suara mayoritas. Seketika, kekejaman meningkat tajam, diorganisir dan diarahkan oleh tentara Indonesia. Misi PBB (Unamet) memberikan penilaiannya pada 11 September: "Bukti adanya hubungan langsung antara milisi dan militer tidak dapat disangkal dan telah didokumentasikan secara mayoritas oleh Unamet selama empat bulan terakhir. Namun skala dan ketelitian penghancuran Timor Timur dalam seminggu terakhir telah menunjukkan tingkat baru

partisipasi terbuka militer dalam pelaksanaan operasi yang sebelumnya lebih terselubung."

Misi tersebut memperingatkan bahwa "yang terburuk mungkin belum terjadi… Tidak dapat dikesampingkan bahwa ini adalah tahap awal dari kampanye genosida untuk memberantas masalah Timor Timur dengan kekerasan"[1].

John Roosa, sejarawan Indonesia dan pengamat resmi pemungutan suara, menggambarkan situasi tersebut dengan gamblang: "Mengingat pogrom itu sangat mudah ditebak, maka pogrom itu dapat dicegah dengan mudah… Namun, dalam minggu-minggu menjelang pemungutan suara, Pemerintahan Clinton menolak untuk membahas dengan Australia dan negara-negara lain tentang pembentukan (pasukan internasional). Bahkan setelah kekerasan meletus, pemerintahan itu menunda-nunda selama berhari-hari"[2]. Akhirnya, karena tekanan internasional (terutama Australia) dan domestik, pemerintahan itu terpaksa membuat beberapa gerakan yang hati-hati. Bahkan pesan-pesan yang ambigu ini cukup untuk mendorong para jenderal Indonesia untuk mengubah arah dan menerima kehadiran internasional.

Sementara Presiden Clinton "menunda-nunda," hampir separuh penduduk diusir dari rumah mereka, menurut perkiraan PBB, dan ribuan orang dibunuh[3]. Angkatan udara yang mampu melakukan penghancuran tepat sasaran terhadap target sipil di Novi Sad, Belgrade, dan Ponceva tidak memiliki kapasitas untuk menjatuhkan makanan kepada orang-orang yang menghadapi kelaparan di pegunungan tempat mereka didorong oleh teror pasukan Indonesia, yang dipersenjatai dan dilatih oleh AS dan sekutunya yang tidak kalah sinis.

Peristiwa baru-baru ini akan membangkitkan kenangan pahit di antara mereka yang tidak berlindung, seperti yang disebut masyarakat internasional, dalam "ketidaktahuan yang disengaja". Kita menyaksikan pengulangan yang memalukan dari peristiwa 20 tahun lalu. Setelah melakukan pembantaian besar-besaran pada tahun 1977–78 dengan dukungan tegas dari Pemerintahan Carter, Indonesia merasa cukup percaya diri untuk mengizinkan kunjungan singkat oleh anggota korps diplomatik Jakarta, di antaranya duta besar AS, Edward Masters. Mereka menyadari bahwa bencana kemanusiaan yang sangat besar telah terjadi. Akibatnya dijelaskan oleh Benedict Anderson, salah satu cendekiawan paling terkemuka di Indonesia. Anderson bersaksi di hadapan PBB bahwa "Selama sembilan bulan penuh kelaparan dan teror, "Duta Besar Masters dengan sengaja menahan diri,

[1] Laporan Misi Dewan Keamanan ke Jakarta dan Dili, 8 sampai 12 September 1999.
[2] New York Times, 15 September 1999.
[3] Boston Globe, 15 September 1999.

bahkan di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri, untuk tidak mengusulkan bantuan kemanusiaan ke Timor Timur." Ia menunggu "sampai para jenderal di Jakarta memberinya lampu hijau" – sampai, seperti yang tercatat dalam dokumen internal Departemen Luar Negeri, mereka merasa "cukup aman untuk mengizinkan pengunjung asing"[4].

Salah satu contoh mengerikan dari keterlibatan AS adalah kudeta yang membawa Jenderal Suharto ke tampuk kekuasaan pada tahun 1965. Pembantaian yang dipimpin oleh Angkatan Darat telah membantai ratusan ribu orang dalam beberapa bulan, sebagian besar adalah petani tak bertanah. Partai komunis yang berkuasa dihancurkan. Pencapaian tersebut menimbulkan euforia yang tak terkendali di Barat dan pujian yang berlebihan bagi kaum "moderat" Indonesia, Suharto dan kaki tangannya di militer, yang telah membersihkan masyarakat dan membukanya untuk penjarahan asing. Robert McNamara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, memberi tahu Kongres bahwa bantuan dan pelatihan militer AS telah "membayar dividen" – termasuk setengah juta mayat. Sebuah laporan kongres menyimpulkan bahwa itu adalah "dividen yang sangat besar". McNamara memberi tahu Presiden Johnson bahwa bantuan militer AS "mendorong (angkatan darat) untuk bergerak melawan partai komunis ketika ada kesempatan." Kontak dengan perwira militer Indonesia, termasuk program universitas, merupakan "faktor yang sangat signifikan dalam menentukan orientasi yang menguntungkan dari elit politik Indonesia yang baru" – angkatan darat[5].

Demikianlah keadaan berlanjut selama 35 tahun bantuan militer, pelatihan, dan komunikasi intensif. Ketika pasukan Indonesia dan pasukan cadangannya membakar Dili, dan pembunuhan serta kehancuran telah mencapai puncaknya, Pentagon mengumumkan bahwa "latihan" AS-Indonesia mengenai penyelamatan dan tindakan kemanusiaan dalam situasi bencana telah berakhir pada tanggal 25 Agustus[6], lima hari sebelum referendum. Pelajaran dari kerja sama ini segera dipraktikkan.

Beberapa bulan sebelumnya, tak lama setelah pembantaian puluhan pengungsi yang berlindung di sebuah gereja di Liquiça, Laksamana Dennis Blair, Panglima Pasifik AS, telah meyakinkan Jenderal Wiranto, kepala angkatan bersenjata Indonesia dan menteri pertahanan, tentang dukungan dan bantuan AS, dengan mengusulkan misi pelatihan AS yang baru[7].

[4] Benedict Anderson, Pernyataan di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB, 20 Oktober 1980.

[5] Untuk tinjauan dan sumber, lihat Noam Chomsky, Tahun 501, South End, Boston, 1993.

[6] AP daring, 8 September 1999.

[7] The Nation, New York, 27 September 1999.

an di abad yang mengerikan ini yang sedang menuju akhir yang mengerikan dan memilukan.

[23] Daniel Patrick Moynihan, A Dangerous Place, Little Brown, Boston, 1978.

Lihat juga Noam Chomsky, Menuju Perang Dingin Baru, Pantheon, New York, 1982.

[23] Washington Post, 5 September 1999.

yang paling radikal, tetapi juga mengejar orang-orang moderat, orang-orang yang memiliki pengaruh di komunitas mereka."

Jauh sebelum referendum, komandan militer Indonesia di Dili, Kolonel Tono Suratman, memperingatkan apa yang akan terjadi: "Jika pihak pro-kemerdekaan menang … semuanya akan hancur … Ini akan lebih buruk daripada 23 tahun yang lalu"[19]. Sebuah dokumen militer awal Mei, ketika kesepakatan internasional tentang referendum dicapai, memerintahkan bahwa "Pembantaian harus dilakukan dari desa ke desa setelah pengumuman pemungutan suara jika pendukung pro-kemerdekaan menang." Gerakan kemerdekaan "harus dihilangkan dari kepemimpinannya sampai ke akar-akarnya"[20]. Mengutip sumber-sumber diplomatik, gereja dan milisi, pers Australia melaporkan "bahwa ratusan senapan serbu modern, granat dan mortir sedang ditimbun, siap digunakan jika opsi otonomi ditolak di kotak suara"[21].

Semua ini dipahami oleh "sahabat-sahabat asing" Indonesia, yang juga tahu bagaimana mengakhiri teror, tetapi lebih suka reaksi mengelak dan ambigu yang dapat dengan mudah ditafsirkan oleh para jenderal Indonesia sebagai "lampu hijau" untuk melaksanakan tugas mereka.

Sejarah yang menyedihkan itu harus dilihat dari latar belakang hubungan AS-Indonesia di era pascaperang[22]. Kekayaan sumber daya alam kepulauan itu, dan lokasi strategisnya yang kritis, menjaminnya memegang peranan utama dalam perencanaan global AS. Faktor-faktor ini melatarbelakangi upaya AS 40 tahun lalu untuk membubarkan Indonesia, yang dianggap terlalu independen dan terlalu demokratis – bahkan mengizinkan partisipasi petani miskin. Faktor-faktor ini menjelaskan dukungan Barat terhadap rezim pembunuh dan penyiksa yang muncul dari kudeta 1965. Prestasi mereka dipandang sebagai pembenaran atas perang Washington di Indochina, yang sebagian besar dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa "virus" nasionalisme independen dapat "menginfeksi" Indonesia, menggunakan retorika ala Kissinger.

Tentunya kita sekarang harus bersedia menyingkirkan mitologi dan menghadapi sebab dan akibat dari tindakan kita, dan tidak hanya di Timor Timur. Di sudut dunia yang tersiksa itu masih ada waktu, meskipun sangat sedikit waktu, untuk mencegah akhir yang mengerikan dari salah satu tragedi paling mengerik-

[19] Australian Financial Review, 14 Agustus 1999.

[20] The Observer, op. cit.

[21] Sydney Morning Herald, 26 Juli 1999.

[22] Lihat Noam Chomsky, "Indonesia, kartu induk di tangan Washington", Le Monde diplomatique, edisi Internet bahasa Inggris, Juni 1998, edisi cetak bahasa Inggris, September 1998.

Tingkat kerja sama antara Washington dan Jakarta sangat mengesankan. Penjualan senjata AS ke Indonesia mencapai lebih dari $1 miliar sejak invasi tahun 1975. Bantuan militer selama masa pemerintahan Clinton sekitar $150 juta, dan pada tahun 1997 Pentagon masih melatih unit Kopassus (lihat artikel oleh Romain Bertrand), yang melanggar maksud undang-undang kongres. Menghadapi catatan ini, pemerintah AS memuji "nilai dari pelatihan bertahun-tahun yang diberikan kepada para pemimpin militer Indonesia di masa depan di AS dan jutaan dolar dalam bentuk bantuan militer untuk Indonesia"[8].

Alasan di balik catatan yang memalukan itu terkadang telah diakui secara jujur. Selama fase terakhir kekejaman, seorang diplomat senior di Jakarta menggambarkan "dilema" yang dihadapi oleh negara-negara adidaya: "Indonesia penting dan Timor Timur tidak"[9]. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Washington harus terus bersikap tidak setuju sambil bersikeras bahwa keamanan internal di Timor Timur adalah "tanggung jawab pemerintah Indonesia, dan kami tidak ingin mengambil tanggung jawab itu dari mereka". Sikap resmi ini, yang ditegaskan kembali beberapa hari sebelum referendum bulan Agustus, diulang dan dipertahankan dengan pengetahuan penuh tentang bagaimana "tanggung jawab" itu telah dilaksanakan[10].

Penalaran diplomat senior itu dijabarkan lebih lengkap oleh dua orang spesialis Asia dari New York Times. Pemerintahan Clinton, tulis mereka, "telah membuat perhitungan bahwa Amerika Serikat harus mengutamakan hubungannya dengan Indonesia, negara kaya mineral dengan lebih dari 200 juta penduduk, daripada kekhawatirannya atas nasib politik Timor Timur, wilayah kecil miskin dengan 800.000 penduduk yang sedang mencari kemerdekaan." The Washington Post mengutip Douglas Paal, presiden Pusat Kebijakan Asia Pasifik, yang menjelaskan fakta-fakta kehidupan: "Timor adalah rintangan dalam perjalanan untuk berurusan dengan Jakarta, dan kita harus melewatinya dengan aman. Indonesia adalah tempat yang sangat besar dan sangat penting bagi stabilitas kawasan ini"[11].

Dalam retorika resmi Washington, "Kita tidak punya anjing yang ikut campur dalam perlombaan Timor Timur". Karenanya, apa yang terjadi di sana bukanlah urusan AS. Namun setelah tekanan intensif Australia, perhitungannya berubah.

[8] New York Times, 14 September 1999.

[9] Jurnal Internasional, London, 8 September 1999; Jurnal Internasional, Boston, 14 September 1999.

[10] Sydney Morning Herald, 25 Agustus 1999, mengutip juru bicara Departemen Luar Negeri James Foley. Menteri Pertahanan William Cohen, jumpa pers, 8 September 1999.

[11] Elizabeth Becker dan Philip Shenon, New York Times, 9 September 1999. Steven Mufson, Washington Post, 9 September 1999.

Seorang pejabat senior pemerintah menyimpulkan: “Kita punya anjing yang sangat besar yang bernama Australia dan kita harus mendukungnya.[12]” Para penyintas kejahatan yang didukung AS di “wilayah kecil miskin” bahkan bukan “anjing kecil”.

Prinsip-prinsip panduan tersebut diutarakan pada tahun 1978, tiga tahun setelah invasi Indonesia ke Timor Timur, oleh duta besar Washington untuk PBB, Daniel Patrick Moynihan. Kata-katanya harus diingat oleh siapa pun yang memiliki minat serius dalam urusan internasional, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dalam memoarnya, Moynihan menulis: “Amerika Serikat menginginkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, dan berupaya mewujudkannya. Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melaksanakannya dengan keberhasilan yang tidak sedikit”[13].

Keberhasilannya memang luar biasa. Moynihan mengutip laporan bahwa dalam waktu dua bulan sekitar 60.000 orang telah terbunuh: “10 persen dari populasi, hampir sama dengan jumlah korban yang dialami Uni Soviet selama perang dunia kedua”. Sebuah tanda keberhasilan, tambahnya, adalah bahwa dalam waktu satu tahun “subjek tersebut menghilang dari pers.” Dan memang demikian, ketika para penyerbu mengintensifkan serangan mereka. Kekejaman mencapai puncaknya pada tahun 1977–78. Dengan mengandalkan aliran baru peralatan militer canggih dari Pemerintahan Carter – dengan penekanan pada hak asasi manusia – militer Indonesia melakukan serangan yang menghancurkan terhadap ratusan ribu orang yang telah melarikan diri ke pegunungan, mendorong para penyintas ke kendali Indonesia. Saat itulah sumber-sumber Gereja yang sangat kredibel di Timor Timur berusaha untuk mempublikasikan perkiraan 200.000 kematian – yang telah lama disangkal, tetapi sekarang akhirnya diterima. Ketika pembantaian mencapai tingkat yang hampir genosida, Inggris dan Prancis bergabung, bersama dengan kekuatan lain, memberikan dukungan diplomatik dan bahkan senjata.

Tahun ini dibuka dengan momen penuh harapan. Presiden sementara Indonesia, B.J. Habibie, telah menyerukan referendum dengan pilihan antara penggabungan dengan Indonesia (“otonomi”) atau kemerdekaan. Militer segera bergerak untuk mencegah hasil ini dengan teror dan intimidasi. Dalam beberapa bulan menjelang referendum bulan Agustus, 3.000 hingga 5.000 orang tewas[14] – jumlah kematian yang jauh lebih besar daripada yang disebutkan oleh NATO (2.000) pada tahun menjelang pengeboman di Kosovo.

[12] Australian Financial Review, Sydney, 13 September 1999.

[13] Washington Post, 5 September 1999.

[14] Washington Post, 5 September 1999.

Menantang kekerasan dan ancaman, hampir seluruh penduduk memilih, banyak yang keluar dari persembunyian untuk melakukannya. Hampir 80% memilih kemerdekaan. Kemudian diikuti fase terakhir kekejaman oleh militer Indonesia dalam upaya untuk membalikkan hasil dengan pembantaian dan pengusiran. Sebagian besar negara itu hancur menjadi abu. Dalam waktu dua minggu lebih dari 10.000 orang mungkin telah terbunuh, menurut Uskup Carlos Filipe Belo, peraih Nobel Perdamaian (lihat artikel oleh Sylvain Desmille). Uskup tersebut diusir dari negaranya di bawah hujan peluru, rumahnya dibakar, dan para pengungsi yang berlindung di sana dikirim ke nasib yang tidak pasti[15].

Bahkan sebelum seruan mendadak Habibie untuk referendum, tentara mengantisipasi ancaman terhadap kekuasaannya, termasuk kendalinya atas sumber daya Timor Timur, dan melakukan perencanaan yang cermat dengan “tujuan, cukup sederhana, … untuk menghancurkan sebuah negara”. Rencana tersebut diketahui oleh intelijen Barat. Tentara merekrut ribuan orang Timor Barat dan mendatangkan pasukan dari Jawa. Yang lebih mengerikan, komando militer mengirim unit-unit pasukan khusus Kopassus yang dilatih di AS, dan, sebagai penasihat militer senior, Jenderal Makarim, seorang spesialis intelijen yang dilatih di AS dengan pengalaman di Timor Timur dan “reputasi atas kekerasan yang tidak berperasaan”[16].

Teror dan kehancuran dimulai di awal tahun. Pasukan tentara yang bertanggung jawab telah digambarkan sebagai “elemen jahat” di Barat. Namun, ada alasan yang baik untuk menerima penugasan tanggung jawab langsung dari Uskup Belo kepada Jenderal Wiranto[17]. Tampaknya milisi tersebut telah dikelola oleh unit elit Kopassus, “unit pasukan khusus yang hebat” yang, menurut koresponden Asia veteran David Jenkins, “telah berlatih secara teratur dengan pasukan AS dan Australia hingga perilaku mereka menjadi sangat memalukan bagi teman-teman asing mereka”[18].

Pasukan ini mengadopsi taktik program Phoenix AS dalam perang Vietnam, yang menewaskan puluhan ribu petani dan sebagian besar pemimpin pribumi Vietnam Selatan, tulis Jenkins, serta “taktik yang digunakan oleh Contras” di Nikaragua. Para teroris negara “tidak hanya mengejar orang-orang pro-kemerdekaan

[15] New York Times, 13 September 1999.

[16] The Observer, London, 13 September 1999.

[17] Shenon, op. cit.

[18] Sydney Morning Herald, 8 Juli 1999.